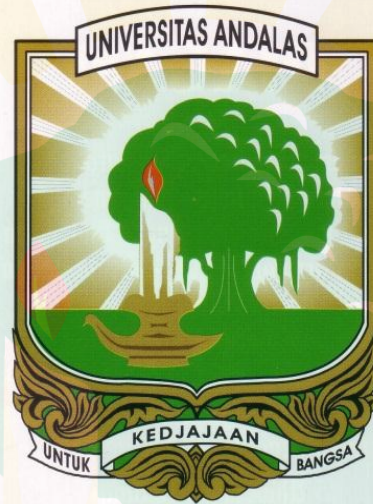


**TESIS**

**PENERAPAN PIDANA CAMBUK DI PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA SEBAGAI  
USULAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas**



**OLEH:**

**PELIA ELZA, S.H.**  
**NIM: 2020112040**

**Dosen Pembimbing :**

- 1. Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2022**

# **PENERAPAN PIDANA CAMBUK DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA SEBAGAI USULAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

**(Pelia Elza, S.H., NIM. 2020112040, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 117 Halaman, 2022).**

## **ABSTRAK**

Zina merupakan suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara seorang wanita dan seorang pria, yang diketahui salah seorang wanita atau pria atau kedua-duanya sedang dalam terikat perkawinan. Pengaturan tentang tindak pidana zina ini diatur dalam Pasal 284 KUHP, sebagaimana yang diketahui bahwa pengaturan tersebut sudah tidak efektif lagi. Contohnya zina saat ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang sedang terikat perkawinan saja, justru banyak yang melakukan zina dari seorang wanita dan seorang pria yang diketahui belum terikat perkawinan, sedangkan dalam Pasal 284 KUHP belum mengatur tentang hal tersebut. Perlunya diadakan suatu pembaharuan hukum pidana terhadap Pasal 284 KUHP ini dengan melihat pada aturan hukum pidana Islam yang lebih dulu mengatur tentang tindak pidana zina ini, baik yang sudah terikat perkawinan maupun yang belum terikat perkawinan. Dalam hukum pidana Islam sanksi untuk tindak pidana zina ini diatur dengan pelaksanaan pidana cambuk dan disertai dengan pengasingan selama satu tahun. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah 1) Bagaimanakah penerapan pidana cambuk terhadap tindak pidana zina di Nanggroe Aceh Darussalam? 2) Bagaimanakah upaya pembaharuan hukum yang dapat ditempuh dalam menerapkan pidana cambuk sebagai pemidanaan di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan hukum utama, dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan diolah dengan proses editing serta dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Penerapan pidana cambuk terhadap kasus tindak pidana zina, sudah diterapkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hal ini dibuktikan pada putusan nomor 5/JN/2021/MS-Sab, penerapan pidana cambuk di Aceh sudah terbilang efektif, hal ini dibuktikan dengan kasus zina yang mengalami penurunan. 2) Upaya pembaharuan hukum setidaknya bertitik tolak pada tiga substansi, yaitu masalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Pidana cambuk sebagai bentuk pidana badan (*corporal punishment*) dimungkinkan dimasukkan secara utuh sebagai salah satu pidana pokok dan dirumuskan dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) RUU KUHP atau minimal dapat dijadikan sebagai pidana pengganti, secara yuridis telah berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dapat dijadikan salah satu alternatif bentuk pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

**Kata Kunci : Pidana Cambuk, Tindak Pidana Zina, Pembaharuan Hukum Pidana.**

# **IMPLEMENTATION OF THE CRIMINAL FLASH IN NANGGROE ACEH DARUSSALAM PROVINCE TO THE CRIME OF ZINA AS A PROPOSED TO RENEWAL THE CRIMINAL LAW**

*(Pelia Elza, S.H., NIM. 2020112040, Master of Law Study Program, Faculty of Law, Andalas University, 117 pages, 2022).*

## **ABSTRACT**

*Zina is an act of sexual intercourse between a woman and a man, it is known that either the woman or the man or both are bound by marriage. The regulation regarding the crime of adultery is regulated in Article 284 of the Criminal Code, as it is known that the regulation is no longer effective. For example, adultery is currently not only committed by someone who is married, in fact many commit adultery from a woman and a man who are known to have not been married, while Article 284 of the Criminal Code does not regulate this. It is necessary to carry out a criminal law reform against Article 284 of the Criminal Code by looking at the rules of Islamic criminal law which first regulates this crime of adultery, both those who are married and those who are not married. In Islamic criminal law, the sanctions for the crime of adultery are regulated by the implementation of caning and accompanied by exile for one year. The formulation of the problems discussed in this paper are 1) How is the application of caning to the crime of adultery in Nanggroe Aceh Darussalam? 2) What are the legal reform efforts that can be taken in applying caning as a punishment in Indonesia?. This study uses a normative juridical approach, namely research conducted by examining library materials as the main legal material, by examining the laws and regulations and regulations related to the legal issues being handled. This research uses a literature study technique and is processed by an editing process and analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it can be concluded that: 1) The application of caning to cases of adultery, has been implemented in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam, this is evidenced by the decision number 5/JN/2021/MS-Sab, the application of caning in Aceh has been fairly effective, this is evidenced by the decline in cases of adultery. 2) Efforts to reform the law have at least three starting points, namely the problem of criminal acts, criminal liability, and criminal and sentencing. Caning as a form of corporal punishment is possible to be included in its entirety as one of the main crimes and formulated in the provisions of Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code Bill or at least it can be used as a substitute punishment, legally it has been applied in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam and can be used as an alternative form of punishment in the penal reform of Indonesia.*

**Keywords:** *Caning, Adultery, Criminal Law Reform.*